

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dibangun sebagai penyokong perekonomian negara. Kehadiran UMKM tidak hanya menyumbang Produk Domestik Bruto, tetapi juga mampu mengembangkan perekonomian, mengurangi angka kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan peningkatan nilai tambah perekonomian nasional sehingga mampu bersaing dalam pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian terutama ketika terjadi krisis. Hal ini dibuktikan bahwa UMKM mampu melewati krisis moneter pada tahun 1998 dan pandemi Covid-19. UMKM merupakan bagian dari perekonomian Indonesia yang mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat dari tiga peranan UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil, sarana mengentaskan kemiskinan dan sarana pemasukan devisa bagi negara (Sulastri, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 UMKM terdiri dari Usaha Mikro, kecil, dan menengah. Berdasarkan Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2021, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau Rp8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97 persen dari total angkatan kerja dan mampu menghimpun hingga 60,4 persen dari total

Karya Ilmiah Mik Perustaban Universitas Kasolik Darma Hindia. Haraga dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran plagiarasi akan dituntut sesuai undang-undang yang berlaku.



investasi di Indonesia (Sulastri, 2022). Berdasarkan data diatas, Indonesia memiliki jumlah UMKM yang banyak sehingga mampu meyerap tenaga kerja yang besar, sehingga Indonesia berpotensi memiliki ekonomi yang kuat. Jika jumlah UMKM terus bertambah setiap tahunnya, maka angka pengangguran di Indonesia akan semakin berkurang.

Jumlah UMKM di Provinsi Jawa Timur menurut lapangan usaha dan kabupaten/kota sebanyak 9.782.262 UMKM, baik dari sektor pertanian maupun non pertanian. Surabaya menempati urutan ke lima untuk jumlah UMKM terbanyak sebesar 385.054 sektor pertanian dan non pertanian. Sedangkan urutan pertama untuk jumlah UMKM terbanyak di Jawa Timur yaitu Jember sebanyak 647.416 UMKM. Pentingnya UMKM dalam sutau negara, perlu adanya usaha atau wadah untuk meningkatkan kinerja pelaku UMKM. Namun, terdapat berbagai masalah yang dihadapi dalam usaha meningkatkan usaha UMKM. Hal tersebut ditunjang oleh anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, pada laman Dinas Kominfo yang dilansir dalam laman resmi [diskopukm.jatim.go.id](http://diskopukm.jatim.go.id). bahwa terdapat 3 (tiga) permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM, diantaranya produksi, pemasaran, dan pembiayaan.

Sentra Wisata Kuliner merupakan kumpulan dari Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berkumpul menjadi satu pusat. Banyaknya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di taman, trotoar, bahkan pinggir jalan, membuat kondisi lalu lintas sekitarnya menjadi kurang kondusif karena pembeli yang berdiri. Terciptanya Sentra Wisata Kuliner mampu membangun untuk mewujudkan kenyamanan pembeli dan pedagang. Pemberdayaan Sentra Wisata Kuliner (SWK) mampu menciptakan Pedagang Kaki Lima (PKL) memperoleh perlindungan dan meningkatkan

perekonomian dalam tempat yang nyaman.

Salah satu yang menjadi tantangan yang dihadapi pelaku UMKM yaitu kurangnya pengetahuan akuntansi. Pelaku UMKM perlu menguasai pentingnya pengetahuan akuntansi untuk mendapatkan informasi tentang laba serta langkah-langkah yang dapat dilakukan selanjutnya agar usahanya tetap dapat berjalan.

Pengetahuan akuntansi adalah suatu kejadian yang nyata terhadap informasi pencatatan, pengelompokan dan pengikhtisaran yang berguna untuk pengambilan keputusan (Haikhal, 2022). Pernyataan tersebut penting untuk dikuasai oleh pelaku UMKM sehingga dari pencatatan transaksi keuangan dan laporan keuangan dapat menentukan keputusan langkah-langkah yang diambil pelaku UMKM selanjutnya, sehingga kegiatan bisnis dapat dijalankan dalam jangka panjang. Pengetahuan yang minim terhadap akuntansi mengakibatkan berbagai masalah, salah satunya yaitu kesulitan dalam memantau kinerja keuangan. Dalam penelitian Melati (2021) variabel pengetahuan akuntansi berpengaruh secara langsung terhadap kompetensi pemilik pengetahuan akuntansi yang kurang akan sulit menentukan kinerja pelaku UMKM dimasa depan, sebagian besar UMKM tidak menyimpan catatan transaksi karena minimnya pengetahuan akan akuntansi.

Penelitiannya Prasetyo dan Farida (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi dan literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Hal ini disebabkan oleh pelaku UMKM masih kurang terkait pengetahuan akuntansi dasar dan pemahaman terkait literasi keuangan. Penelitian yang lain dilakukan oleh Nugraha et al (2021) dari hasil wawancara terhadap pengurus paguyuban UMKM Sentra Kaos Surapati Bandung, menyatakan bahwa pengusaha UMKM daerah Suropati tidak memiliki pengetahuan akuntansi yang minim dipahami oleh pelaku

UMKM dan banyak dari pengusaha yang belum tahu tentang pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan usaha. Terkait penelitian tersebut, penyebab UMKM Indonesia kurang berkembang menjadi bisnis yang besar karena pelaku bisnis yang belum menguasai pengetahuan akuntansi dan literasi keuangan.

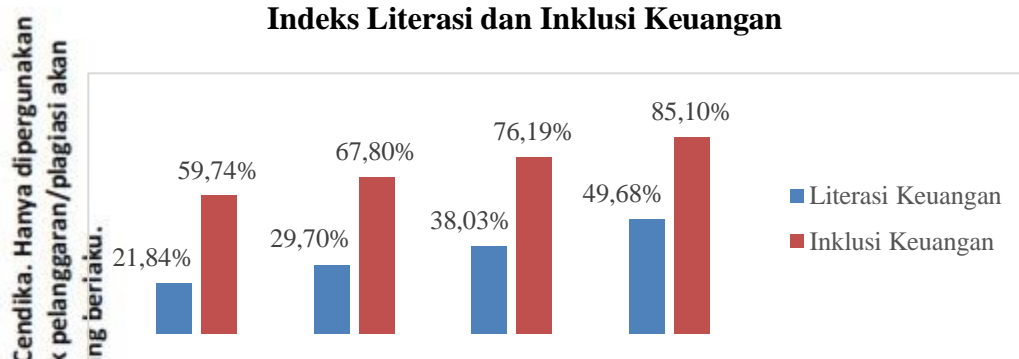
Pemahaman masyarakat tentang literasi keuangan menjadi pondasi yang perlu diperkuat, agar masyarakat mampu berperilaku bijak dan dapat mengambil keputusan finansial dengan tepat, terutama dalam lingkungan keuangan yang terus berubah sesuai perkembangan. Kepada Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewa pada laman [Republika.com](http://Republika.com) menekankan pentingnya literasi keuangan di tengah perkembangan sektor keuangan yang semakin dinamis (Risalah, 2023). Pada tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran No. 1/SE/OJK/07./2014 tentang edukasi terhadap konsumen dan masyarakat terkait literasi keuangan yang menggunakan 4 (empat) prinsip yaitu inklusif, sistematis, terukur dan kemudahan dalam penggunaannya.

Berdasarkan literasi keuangan dan inklusi keuangan menjadi menarik untuk diteliti karena berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan 2019 masing-masing mencapai 38,03% dan 76,19%. Meskipun mengalami peningkatan, namun hal ini masih diperlukan pengetahuan tentang literasi keuangan karena semakin tinggi tingkat literasi keuangan seseorang maka semakin besar tingkat pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan. Septiani dan Wuryani (2020) Literasi keuangan juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk meningkatkan pengetahuan

(knowledge), kemampuan (skill), dan keyakinan (confidence) agar keuangan masyarakat lebih sejahtera dan juga mampu mengelola keuangan.

**Gambar 1.1**

**Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan**



Sumber : OJK SNLIK Survei (2022)

literasi keuangan merupakan kemampuan dalam mengelola dana yang dimiliki agar mampu berkembang sehingga berdaya pada hidup yang lebih sejahtera di masa mendatang (Herdinata dan Pranatasari, 2020:145). Menurut Kusnanto dan Gusapto (2021:14) literasi keuangan adalah kepemilikan seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seseorang untuk membuat keputusan yang tepat dan efektif dengan semua sumber daya keuangan mereka. Menurut Lusardi, Annamaria; Mitchell (2008) dalam Septiani dan Wuryani (2020) literasi keuangan merupakan keterampilan seseorang untuk mencapai perilaku keuangan yang lebih baik, sehingga pengetahuan, keahlian dan perilaku tersebut menjadi kesatuan yang saling berkaitan dalam konsep literasi keuangan. Melalui beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan merupakan kemampuan dalam pemahaman seseorang maupun lapisan masyarakat mengenai cara pengelolaan keuangan dengan efektif dan efisien sesuai kondisi

perekonomian yang dihadapi.

Menurut Furqani (2017) dalam Septiani dan Wuryani (2020) ruang lingkup literasi keuangan mencakup berbagai materi atau pengetahuan berkaitan dengan keuangan itu sendiri, seperti (1) pengertian transaksi ekonomi, dan bermacam-macam jenis praktiknya; (2) mengetahui sumber daya ekonomi, yang mencakup sumber daya ala dan sumber daya manusia; (3) pengenalan konsep belanja sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, yang mencakup skala prioritas, gaya hidup ughari dan im konsumen; (4) memahami konsep menyimpan secara tradisional maupun modern diantaranya menabung, asuransi dan investasi; (5) memahami konsep praktik keuangan tidak sehat, serta kejahatan keuangan seperti korupsi, investasi bodong ataupun kejahatan finansial lainnya. Setidaknya pelaku UMKM disarankan untuk mampu melakukan pengelolaan keuangan yang mencakup beberapa hal sebagai berikut: penggunaan dana; penentuan sumber dana, manajemen risiko; dan perencanaan masa depan (Herdinata dan Pranatasari, 2020:11)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2017 menjelaskan inklusi keuangan merupakan keberadaan akses jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari inklusi keuangan yaitu meningkatnya akses masyarakat, penyediaan, penggunaan kualitas produk dan layanan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Yanti (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa variabel inklusi keuangan dan literasi keuangan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di kecamatan Moyo Utara. Kinerja UMKM akan meningkat signifikan apabila pelaku UMKM dapat meningkatkan pengetahuan

terhadap inklusi keuangan dan literasi keuangan.

Suyono dan Zuhri (2022) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa inklusi keuangan dan literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Artinya semakin mudahnya pelaku UMKM mengakses layanan lembaga keuangan maka pelaku usaha UMKM dapat meningkatkan kinerja UMKM. Pemahaman tentang literasi yang baik maka pelaku UMKM dapat mengelola keuangan usaha dan meningkatkan kinerja UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Hilmawati dan Kusumaningtias (2021) menunjukkan bahwa inklusi keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM, sedangkan literasi memiliki pengaruh terhadap kinerja UMKM. Faktor yang mempengaruhi inklusi keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM yaitu pola pikir pengusaha UMKM, banyak dari pelaku usaha rata-rata berpendidikan SMA/SMK dan 35% memiliki pendidikan akhir sarjana membuat mereka dapat memanfaatkan teknologi yang tersedia sehingga inklusi keuangan tidak mempengaruhi perkembangan kinerja UMKM.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka peneliti mengangkat permasalahan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Akuntansi, Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap kinerja UMKM?
2. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM?
3. Apakah inklusi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap kinerja UMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM.
3. Untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini yaitu menguatkan konsep literasi keuangan dan inklusi keuangan dalam penelitian pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap UMKM terutama di Indonesia dan dapat memberikan variasi baru yaitu lokasi penelitian.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai kalangan digunakan sebagai alat untuk mempelajari pengetahuan akuntansi, literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM, yaitu :

- a. Bagi pihak UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi UMKM dan dapat memberikan masukan terkait pentingnya pengetahuan akuntansi, literasi keuangan dan inklusi keuangan untuk meningkatkan kinerja usahanya.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi bahan peneliti selanjutnya terkait pengetahuan akuntansi, literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja usaha mikro kecil menengah.



c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak pemerintah untuk merancang strategi untuk meningkatkan kinerja usaha mikro kecil menengah dengan pengetahuan akuntansi, literasi keuangan dan inklusi keuangan dan menjadi bahan evaluasi apakah program yang dilakukan sudah sesuai target yang dicapai atau masih harus menambah strategi untuk meningkatkan kinerja UMKM.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

